



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

**KEGIATAN PEREMAJAAN KELAPA SAWIT
PEKEBUN PENGEMBANGAN SDM DAN SARANA
PRASARANA TAHUN 2021**

**TIM SARANA DAN PRASARANA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**



**DINAS PERTANIAN KAB. PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Laporan ini merupakan salah satu pertanggung jawaban biaya dukungan kegiatan penyaluran dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (biaya operasional) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI Nomor : 021/SET.SP/SPK/04/2021 dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 525 /505/Distanhortbun-PS/IV/2020 tanggal 5 April 2021

Ruang lingkup pekerjaan dukungan kegiatan penyaluran dana yang menjadi kewajiban Tim Khusus meliputi : (1) melakukan verifikasi usulan dari kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya, (2) melakukan pendampingan kegiatan sarana dan prasarana, (3) melaksanakan sosialisasi, pengawalan, monitoring, evaluasi dan pengawasan sesuai kewenangan, (4) menyiapkan bahan rekomendasi teknis usulan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit; (5) menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi, sumber daya manusia dan keuangan (6) Membantu tugas dan mempertanggungjawabkan kegiatan kepada Ketua Tim Khusus Fasilitasi Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan; (7) Melaporkan hasil kegiatan sarana dan prasarana ke Direktorat Jenderal Perkebunan.

Tim sudah berupaya melakukan pendampingan dalam mempersiapkan dokumen persyaratan. Sudah dilakukan upaya untuk percepatan dalam mempersiapkan dokumen ini. Hasil verifikasi yang dilakukan tingkat kabupaten menunjukkan masih ada dokumen dan profil lahan yang harus diperbaiki. Hingga akhir tahun ini proses masih berjalan dan belum ada dari dua koperasi yang rekomtek. Hal ini tentu menjadi evaluasi bagi tim untuk bisa melakukan perbaikan dalam kinerja agar ditahun 2022 ini dua koperasi yang mengajukan kegiatan ini bisa rekomtek.

Painan. 31 Desember 2021



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Sasaran	2
1.3 Landasan Pelaksanaan	3
1.4 Struktur Organisasi Tim Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.....	3
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN PEREMAJAAN KELAPA SAWIT	
PEKEBUN	
2.1 Target Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit	4
2.2 Verifikasi usulan dokumen yang dicapai.....	4
2.3 Rekomtek yang diterbitkan Ditjen Perkebunan.....	6
2.4 Capaian Rekomtek Sarana dan Prasarana Perkebunan KelapaSawit.....	6
BAB III PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL	
3.1 Aloasi Dana Operasional (RAB)	7
3.2 Realisasi Penggunaan Dana Operasional	12
3.3 Rekapitulasi SPTB, Pembayaran	
Pajak	16
BAB IV REALISASI KEGIATAN LAPANGANSARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	
4.1 Sosialisasi Tingkat Desa dan Kabupaten	24
4.2 Pendampingan di Lapangan	24
BAB V PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT	
5.1 Permasalahan Keuangan	26
5.2 Permasalahan Teknis	26
5.3 Rencana Tindak Lanjut	27
5.4 Upaya Percepatan	27

BAB VI MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN	
6.1 Laporan Monev Bulanan	28
6.2 Laporan Kemajuan Fisik Lapangan	28
BAB VII PENUTUP	29
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 1		4
Tabel 2		5
Tabel 3		5
Tabel 4		6

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya pengembangan perkebunan kelapa sawit pekebun (rakyat) dilakukan melalui kebijakan antara lain revitalisasi perkebunan dan kewajiban setiap perusahaan penerima Izin Usaha Perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat di sekitarnya paling rendah seluas 20% dari izin yang diberikan oleh bupati/wali kota, gubernur atau Menteri Pertanian sesuai kewenangannya. Melalui perkebunan kelapa sawit, pekebun yang tergabung dalam kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi atau pun kelembagaan ekonomi pekebun lainnya, memperoleh kesempatan sebagai pemilik dan penerima manfaat. Dalam kerangka seperti itu, terdapat peluang pemerataan pendapatan yang lebih adil dan merata, juga kemitraan dengan perkebunan besar secara berkesinambungan.

Pada tahun 2018, perkebunan kelapa sawit telah mencapai seluas 14,3 juta hektar dan 5,6 juta hektar (41%) di antaranya merupakan perkebunan kelapa sawit milik pekebun. Namun demikian, produksi dan produktivitas kelapa sawit milik pekebun belum sesuai dengan potensi. Salah satu faktor penyebabnya adalah sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit yang belum berjalan dengan baik. Menurut data Laporan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, luas seluruh areal tanaman kelapa sawit pada tahun 2020 tercatat $\pm$ 154.258 Ha yang terdiri dari 83.034 ha rakyat / petani dan 71.224 ha merupakan perkebunan Perusahaan Swasta. Dukungan pengembangan kelapa sawit melalui kebijakan tersebut antara lain melalui kegiatan sarana dan prasarana. Kegiatan tersebut mengintegrasikan seluruh aspek dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam rangka meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu kelapa sawit milik pekebun.

Keterlibatan aktif Direktorat Jenderal Perkebunan dalam kegiatan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit rakyat/pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Untuk Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. (Kecamatan Lunag dan Kecamatan Silaut) pada Tahun 2021 berdasarkan MoU Surat Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI Nomor : 021/SET.SP/SPK/04/2021 dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 525 /505/Distanhortbun-PS/IV/2020 tanggal 5 April 2021.

Setelah itu, Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan mengusulkan sarana dan prasarana ke Direktorat Jenderal Perkebunan dengan mengacu kepada *grand design* sarana dan prasarana dalam bentuk pedoman yang mengatur aspek teknis kegiatan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit pekebun/rakyat. Pedoman tersebut ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Perkebunan No. 273/2020 pedoman teknis sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dalam kerangka

1.3 Landasan pelaksanaan

Landasan Pelaksanaan dalam sarana dan prasarana dalam kerangka pendanaan

BPDPKS meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
2. Peraturan Menteri Pertanian No. 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengembangan dan Penelitian, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
4. Keputusan Dirjen Perkebunan No. 273/Kpts/KH.160/9/2020
5. Tentang Pedoman Teknis Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
6. Peraturan Dirut BPDPKS Per-07 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit

1.4 Struktur Organisasi Tim Khusus

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 111/KPTS/OT.050/4/ 2017 sebagaimana diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 216/KPTS/OT.050/9/2017 tentang Pembentukan Tim Khusus Fasilitasi Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana. Tim Khusus berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan. Dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 525/10/KPTS/DISTAN-PS/SASPRAS/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Perubahan lampiran SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan No: 525/06/KPTS/DISTANHORTBUN/SASPRAS/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tim Sarana dan prasarana Pekebun dan Sarana Prasarana Pekebunan Kelapa Sawit. Tim Khusus Kabupaten/Kota yang diketuai oleh kepala dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan dibentuk struktur organisasi sebagai berikut :

Tabel 1. Perubahan Tim Sarana dan prasarana Pekebun Tahun 2021

No	Jabatan pada Tim Sarana dan Prasarana	Lama Nama / NIP	Baru Nama / NIP
1.	Ketua	Ir. Nuzirwan N, MT Nip. 19670826 199803 1001	Ir. Widya Dari Nip. 19640812 199202 2 001
2.	Sekretaris	Liusman, S.STPi Nip. 19700106 199403 1009	Hamijon, SP M.Si Nip. 19641231 199701 1 001
3.	Verifikator	Yul Afrizal, SP Nip. 19781112 201101 1005	Syastra Lasmana, STP Nip. 19780701 201407 1002
4.	Verifikator	Wardi ,STP Nip. 19941012 201903 2001	Wardi ,STP Nip. 19941012 201903 2001
5.	Bendahara	Rosi Yulita, SP Nip. 19800810 201101 2010	Rosi Yulita, SP Nip. 19800810 201101 2010
6.	Staf Pengelola Keuangan/Verifikator keuangan	Noni Mardiani, SP	Noni Mardiani, SP

Ruang lingkup pekerjaan dukungan kegiatan penyaluran dana yang menjadi kewajiban Tim Khusus meliputi : (1) melakukan verifikasi usulan dari kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya, (2) melakukan pendampingan kegiatan sarana dan prasarana, (3) melaksanakan sosialisasi, pengawalan, monitoring, evaluasi dan pengawasan sesuai kewenangan, (4) menyiapkan bahan rekomendasi teknis usulan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit; (5) menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi, sumber daya manusia dan keuangan (6) Membantu tugas dan bertanggungjawabkan kegiatan kepada Ketua Tim Khusus Fasilitasi Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan; (7) Melaporkan hasil kegiatan sarana dan prasarana ke Direktorat Jenderal Perkebunan.

II. PELAKSANAAN SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

2.1 Target

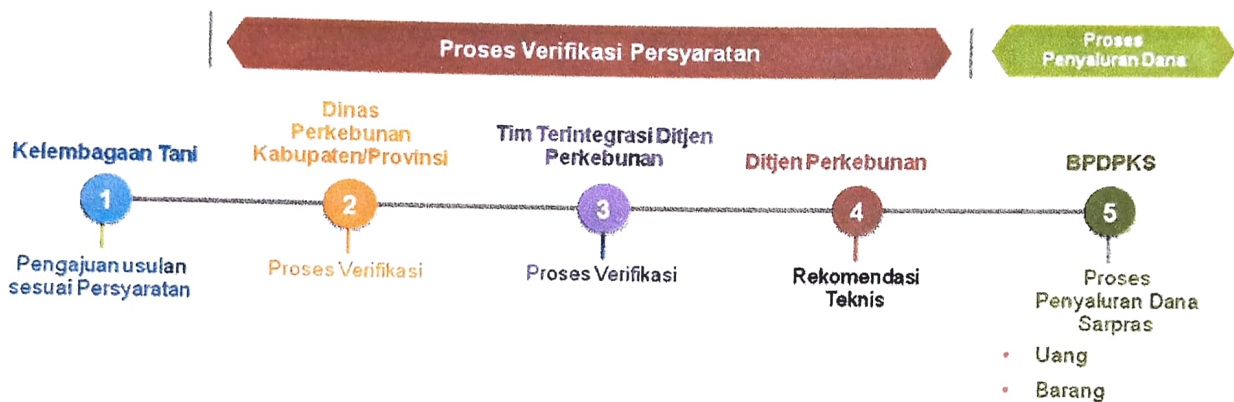
Kegiatan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah Intensifikasi (Pupuk dan Pestisida) dan Jalan Kebun

Tabel 2. Target Sarana dan prasarana Pekebun Tahun 2021

No	Kecamatan	Keltan/Gapoktan/KUD	Kegiatan
1.	Silaut	Koperasi Langgeng Jaya Sejahtera	Jalan Kebun
2.	Silaut	Perkumpulan Kelompok Tani Karya Bersama	Intensifikasi (Pupuk dan Pestisida)

2.2 Verifikasi usulan dokumen yang dicapai

Pelaksanaan sarana dan prasarana perkebunan dimulai dari pengajuan usulan sesuai persyaratan dan dilanjutkan dengan verifikasi secara berjenjang mulai dari kabupaten sampai ditjenbun. Berikut alur tata kelola penyaluran dana sarana prasarana perkebunan kelapa sawit :



Persyaratan Sarpras

- Sesuai Kepdirjenbun No 273/Kpts./HK.160/9/2020

A. Koperasi Langgeng Jaya

Tabel 3. Verifikasi Koperasi Langgeng Jaya

Verifikasi Koperasi Langgeng Jaya Sejahtera		Keterangan
1	Surat permohonan	ada
2	Profil lahan	ada
3	Profil Pekebun	ada
4	Rencana Kerja dan RAB	ada
5	Surat kuasa asli masing-masing anggota kelompok tani /gapoktan/ lembaga pekebun lainnya/ koperasi	ada
6	Scan KTP dan KK asli atau surat keterangan rekaman kependudukan masing- masing pekebun	ada
7	FC SHM atau bukti Legalitas lahan lain (SKT, Girik, Sporadik, Letter C, pletok, AJB, Hak adat/komunal)	ada
8	FC STDB/Surat Pernyataan dalam proses dalam jangka waktu yang ditentukan (kepala dinas Kab/kota)	belum
9	Legalitas dan Susunan Pengurus kelompok tani/gapoktan/lembaga pekebun lainnya/koperasi (Badan Hukum)	ada
10	Peta usulan lokasi kebun yang berkoordinat	ada
11	Surat penawaran barang dari produsen/distributor.	belum

Verifikasi Koperasi Langgeng Jaya Sejahtera		Keterangan
12	Surat keterangan kepemilikan lahan tidak dalam sengketa.	ada
13	Surat pernyataan kebun tidak berada dalam kawasan hutan	ada
14	Surat pernyataan umur tanaman kelapa sawit	ada
15	Legalitas dan susunan pengurus	ada

Total lahan awal yang diajukan untuk mendapatkan manfaat sarana jalan perkebunan 62 Ha setelah dibuatkan peta berkoordinat dan peta bebas dari kawasan dari dinas kehutanan propinsi luas lahan yang berada pada area penggunaan lain 46,5 ha. Luas lahan setelah dibuatkan peta berkoordinat turun menjadi 51,5 Ha dan 5 Ha lahan masuk areal Penundaan Izin Baru Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut (**PIPPIB**). Untuk itu perlu ada penambahan lahan yang menerima manfaat jalan perkebunan karena syarat minimal lahan yang menerima manfaat diatas 50 Ha. Hasi verifikasi berdasarkan peta polygon citra satelit

1. Terdapat lahan yang tidak berada disatu hamparan
2. Terdapat $\pm 6,8$ ha terindikasi lahan kosong dan 9,8 ha terindikasi umur tanaman kurang dari 4 tahun..

B. Perkumpulan Kelompok Tani Karya Bersama

Tabel 4. Verifikasi Perkumpulan Kelompok Tani karya Bersama

Verifikasi Perkumpulan Kelompok Tani Karya Bersama		Keterangan
1	Surat permohonan	ada
2	Profil lahan	ada
3	Profil Pekebun	ada
4	Rencana Kerja dan RAB	ada
5	Surat kuasa asli masing-masing anggota kelompok tani /gapoktan/ lembaga pekebun lainnya/ koperasi	ada
6	Scan KTP dan KK asli atau surat keterangan rekaman kependudukan masing- masing pekebun	ada
7	FC SHM atau bukti Legalitas lahan lain (SKT, Girik, Sporadik, Letter C, pletok, AJB, Hak adat/komunal)	ada
8	FC STDB/Surat Pernyataan dalam proses dalam jangka waktu yang ditentukan (kepala dinas Kab/kota)	belum
9	Legalitas dan Susunan Pengurus kelompok tani/gapoktan/lembaga pekebun lainnya/koperasi (Badan Hukum)	ada
10	Peta usulan lokasi kebun yang berkoordinat	belum
11	Surat penawaran barang dari produsen/distributor.	belum
12	Surat keterangan kepemilikan lahan tidak dalam sengketa.	belum
13	Surat pernyataan kebun tidak berada dalam kawasan hutan	belum
14	Surat pernyataan umur tanaman kelapa sawit	ada
15	Legalitas dan susunan pengurus	ada

Khusus untuk surat bebas sangketa, pengusul ingin menghindari kesalahpahaman ditingkat nagari jadi perlu dipastikan lahan bebas dari kawasan hutan dan HGU yang diajukan ke wali nagari untuk dibuatkan surat bebas sangketa, karena lahan yang diajukan untuk menerima manfaat intensifikasi berada di empat nagari dan dominan berada di satu nagari Lubuk Bunta. Surat bebas kawasan dan HGU sudah dikirimkan ke Dinas Kehutanan Propinsi dan Badan Pertanahan Nasional untuk dilakukan verifikasi profil lahan. Berdasarkan verifikasi dari peta poligon citra satelit ditemukan

1. Total lahan yang diajukan berdasarkan profil lahan 77,5 ha, dipeta poligon luas lahan ditemukan 69,442 ha
2. Ditemukan satu pekebun memiliki lahan lebih dari 4 ha yaitu 6,87 ha

2.3 Rekomtek yang diterbitkan oleh Ditjen Perkebunan

Kabupaten Pesisir Selatan mengajukan dua koperasi untuk menerima manfaat kegiatan sarana dan prasarana perkebunan. Progres kerja bahan sudah diserahkan ke Propinsi untuk dilakukan verifikasi dan diteruskan ke Ditjen Perkebunan, belum ada dari koperasi ini yang rekomtek untuk tahun 2021.

BAB III PENGGUNAAN DANA OPERATIONAL

3.1 Alokasi Dana Operational



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA (RAB) 40% SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PROVINSI SUMATERA BARAT KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2021

INTEN : 50 Ha
JALAN : 50 Ha
ISPO : 0 Ha

MENJADI				
NO	KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)
Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi				
I	Sosialisasi di Pengusul			73.536.000
				4.450.000
a.	Belanja Bahan			1.000.000
	Konsumsi Sosialisasi	25	OH	40.000
				1.000.000
b.	Belanja Perjalanan			3.450.000
	Perjalanan dalam	4	OT	550.000
				2.200.000

	rangka sosialisasi								
	Bantuan transport peserta	25		OT		50.000		1.250.000	
II	Perjalanan Tenaga/Petugas Pendamping							4.936.000	
a	Belanja Bahan							4.936.000	
	ATK, Fotocopy dan Pelaporan dll	3		Bln		112.000		336.000	
	Tingkat Desa/Pendamping Sarpras	6		OT		200.000		1.200.000	
	Tingkat Kecamatan	4		OT		300.000		1.200.000	
	Tingkat Kabupaten/Koordinator Pendamping Sarpras	4		OT		550.000		2.200.000	
III	Operasional Kegiatan Sarpras							64.150.000	
a.	Belanja Pengiriman surat dinas pos							400.000	
	pengiriman dokumen	2		Bln		200.000		400.000	
b.	Rapat berkala dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi							5.300.000	

	Konsumsi rapat dalam rangka koordinasi	20	OH	50.000	1.000.000
	Narasumber	4	OJ	900.000	3.600.000
	Moderator	1	OK	700.000	700.000
c.	Belanja Bahan				1.250.000
	ATK, Bahan Komputer , fotocopy, dll	3	Bln	250.000	750.000
	Toner atau tinta printer	2	Bln	250.000	500.000
	Langganan internet/wifi	-	Bln	360.000	-
d.	Belanja honor out kegiatan				1.450.000
	Honor Tim				1.450.000
	Ketua Tim	1	OK	400.000	400.000
	Sekretaris/Koordinator Peremajaan	1	OK	300.000	300.000
	Verifikator Usulan	3	OK	250.000	750.000
e.	Belanja Honor Pengelola Keuangan				4.380.000
	Bendahara	6	OB	420.000	2.520.000
	Staff Pengelola keuangan/Verifikator keuangan	6	OB	310.000	1.860.000
f.	belanja sewa				9.200.000

	laptop	6	Bln	1.000.000	6.000.000
	printer/Scanner	6	Bln	300.000	1.800.000
	GPS (selama 4 bulan)	4	Unit	350.000	1.400.000
3.	<i>Belanja Perjalanan Biasa</i>				23.288.000
	Pengecekan ke lapangan	6	OT	550.000	3.300.000
	Pengawalan dan Pembinaan	6	OT	550.000	3.300.000
	Koordinasi dan konsultasi ke Provinsi	4	OT	790.000	3.160.000
	Koordinasi dan konsultasi ke Pusat dan Instansi terkait	2	OT	6.764.000	13.528.000
4.	<i>Belanja Perjalanan Paket Meeting dalam Kota</i>				1.950.000
	Pertemuan Pemberkasan	3	OT	650.000	1.950.000
.	<i>Belanja Perjalanan paket Meeting luar kota</i>				16.932.000
	Perjalanan dalam rangka Verifikasi	1	OT	5.444.000	5.444.000
	Rekonsiliasi Keuangan	1	OT	5.444.000	5.444.000
	Monitoring Evaluasi	1	OT	5.444.000	5.444.000
	uang representatif	4	OT	150.000	600.000

Painan, 31 Desember 2021

Ketua Tim Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
Kabupaten Pesisir Selatan



3.2 Realisasi penggunaan dana operational

**REALISASI KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKUTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN TA, 2021
BULAN : DESEMBER 2021**

NO	URAIAN	JUMLAH DANA	REALISASI			SISA DANA	%
			SD BLN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3-6)	8
Kegiatan Sarana dan Prasarana Pesisir Selatan							
					29.784.500		
I	Sosialisasi di Pengusul				-		
a	Belanja Bahan						
	Konsumsi Sosialisasi	1.000.000	1.000.000		1.000.000	-	100
b	Belanja Perjalanan						
	Perjalanan dalam rangka sosialisasi	2.200.000	2.200.000		2.200.000	-	100
	Bantuan transport peserta	1.250.000	1.250.000		1.250.000	-	100
II	Perjalanan Tugas/Petugas Pendamping						

[illegible]

	Langganan internet/wifi	-	-	-	-	-			
d	Belanja honor output kegiatan								
	Honor Tim								
	Ketua Tim	400.000	-	-	-	400.000			0
	Sekretaris/Koordinator Peremajaan	300.000	-	-	-	300.000			0
	Verifikator Usulan	750.000	-	-	-	750.000			0
e	Belaja Honor Pengelola Keuangan								
	Bendahara	2.520.000	1.260.000	1.260.000	2.520.000	-			100
	Staff pengelola keuangan/Verifikator Keuangan	1.860.000	930.000	930.000	1.860.000	-			100
f	Belanja sewa								
	Laptop	6.000.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000	-			100
	printer/scanner	1.800.000	900.000	900.000	1.800.000	-			100
	GPS (selama 4 bulan)	1.400.000	-	-	-	1.400.000			0
g	Belanja Perjalanan Dinas Biasa								
	Pengecekan ke lapangan	3.300.000	600.000		600.000				18,1818
	Pengawalan dan Pembinaan		-	-	-	3.300.000			0

		3.300.000				-			
	Koordinasi dan konsultasi ke Provinsi	3.160.000	2.350.000	-		2.350.000	810.000	74,3671	
	Koordinasi dan konsultasi ke Pusat dan Instansi terkait	13.528.000	8.478.500	-		8.478.500	5.049.500	62,6737	
h	Belanja Perjalanan Paket Meeting dalam Kota								
	Pertemuan Pemberkasan	1.950.000	-	680.000		680.000	1.270.000	34,8718	
i	Belanja Perjalanan Paket Meeting luar Kota								
	Perjalanan dalam rangka verifikasi	5.444.000	-	-		-	5.444.000	0	
	Rekonsiliasi Keuangan	5.444.000	-	-		-	5.444.000	0	
	Monitoring Evaluasi	5.444.000	-	-		-	5.444.000	0	
	Uang Representatif	600.000	-	-		-	600.000	0	
	Jumlah	73.536.000	23.014.500	6.770.000		29.784.500	43.751.500	40,5033	

Painan, 31 Desember 2021

Bendahara Tim

Rosi Yulita

Rosi Yulita, SP

Nip. 19800810 201101 2010



3.3 Rekapitulasi SPTB, Pembayaran Pajak dan Bunga

a. SPTB

Mei - Desember
2021

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Kegiatan Swakelola : Antara Direktorat Jenderal Perkebunan No : 021 / SET.SP/SPK/ 04 / 2021 dengan Dinas Tanaman pangan Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 5 April 2021

Sumber Dana : Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

Nama : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
Tanggal/No.DIPA : DIPA BPD P Kelapa Sawit No.

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Tim Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Pesisir Selatan , menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan material atas kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran belanja-belanja ini dengan perincian sebagai berikut :

AK : 4712.FAM.005.100.A.525117. Belanja Pengelolaan Dana
UN Perkebunan Kelapa Sawit

NO	TANGGAL	PENERIMA	U R A I A N	JUMLAH (Rp)	PAJAK YANG DIPUNGUT (Rp)			
					PPN (%)	PPh Pasi 21 (%)	PPh Pasal 23 (%)	Pajak Restoran
1	31 Mei 2022		Nihil	-				

2	30 Juni 2021	Ir. Nuzirwan N, MT	Perjalanan dinas dari Painan ke Bogor pada tanggal 3 - 4 Juni 2021 dalam rangka menghadiri undangan Pertemuan Penyusunan rencana kerja Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit	01 / III.f.4 /Sarpras/ VI / 2021	3.957.250				
3	30 Juni 2021	Liusman, S.STPi	Perjalanan dinas dari Painan ke Bogor pada tanggal 2 - 4 Juni 2021 dalam rangka menghadiri undangan Pertemuan Penyusunan rencana kerja Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit	02 / III.f.4 /Sarpras/ VI / 2021	4.521.250				
4	30 Juni 2021	Toko Bunda Offset	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) untuk kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021	03 / III.g.1 /Sarpras/ VI / 2021	406.000				
5	30 Juni 2021	Toko Bunda Offset	Pembelian tinta Epson untuk kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021	04 / III.g.2 /Sarpras/ VI / 2021	500.000				
6	30 Juli 2021	J & T Painan	Biaya Pengiriman dokumen revisi RAB kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021	05 / III.a.1 /Sarpras/ VII / 2021	20.000				
7	30 Agustus 2021	Galaxy Digital Printing	Pembelian Spanduk Sosialisasi kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa sawit Tahun 2021	06/III.c.1/Sarpras/ VIII/ 2021	120.000				
8	30 Agustus 2021	Syafrinal	Biaya Transport peserta sosialisasi kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021	07/ I.b.2 /Sarpras/ VIII / 2021	1.250.000				
9	30 Agustus 2021	Idel Catering Silaut	Makan minum peserta Sosialisasi kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021	08/ I.a.1 /Sarpras/ VIII / 2021	1.000.000				100.000

10	30 Agustus 2021	Ir. Nuzirwan N, MT	Perjalanan Dinas dari Painan ke Kec. Silaut pada tanggal 26 - 27 Agustus 2021 dalam rangka Sosialisasi Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021	09/ I.b.1 /Sarpras/ VIII / 2021	550.000				
11	30 Agustus 2021	Liusman, S.STPi	Perjalanan Dinas dari Painan ke Kec. Silaut pada tanggal 26 - 27 Agustus 2021 dalam rangka Sosialisasi Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021	10/ I.b.1 /Sarpras/ VIII / 2021	550.000				
12	30 Agustus 2021	Yul Afrizal, SP	Perjalanan Dinas dari Painan ke Kec. Silaut pada tanggal 26 - 27 Agustus 2021 dalam rangka Sosialisasi Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021	11/ I.b.1 /Sarpras/ VIII / 2021	550.000				
13	30 Agustus 2021	Rosi Yulita, SP	Perjalanan Dinas dari Painan ke Kec. Silaut pada tanggal 26 - 27 Agustus 2021 dalam rangka Sosialisasi Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021	12/ I.b.1 /Sarpras/ VIII / 2021	550.000				
14	30 September 2021	Shinta Komputer	Sewa Laptop selama 3 bulan (Juni - Agustus 2021) untuk kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021	13/III.e.1/Sarpras/ IX/ 2021	3.000.000			60.000	
15	30 September 2021	Shinta Komputer	Sewa Printer selama 3 bulan (Juni - Agustus 2021) untuk kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021	14/III.e.2/Sarpras/ IX/ 2021	900.000			18.000	

16	30 September 2021	Rosi Yulita, SP	Honor Bendahara dan Staf Pengelola Keuangan A.n Rosi Yulita, SP Cs Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021	15/III.d.1.2/Sarpras/ IX/ 2021	2.190.000	63.000		
17	30 September 2021	Ir. Nuzirwan N, MT	Perjalanan Dinas dari Painan ke Padang pada tanggal 15 -16 September 2021 dalam rangka Sosialisasi Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021	16/ III.f.3 /Sarpras/ IX / 2021	240.000			
18	30 September 2021	Liusman, S.STPi	Perjalanan Dinas dari Painan ke Padang pada tanggal 15 -16 September 2021 dalam rangka Sosialisasi Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021	17/ III.f.3 /Sarpras/ IX / 2021	240.000			
19	30 September 2021	Yul Afrizal, SP	Perjalanan Dinas dari Painan ke Padang pada tanggal 15 -16 September 2021 dalam rangka Sosialisasi Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021	18/ III.f.3 /Sarpras/ IX / 2021	240.000			
20	30 September 2021	Wardi, STP	Perjalanan Dinas dari Painan ke Padang pada tanggal 15 -16 September 2021 dalam rangka Sosialisasi Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021	19/ III.f.3 /Sarpras/ IX / 2021	240.000			
21	28 Oktober 2021	Ir. Nuzirwan N, MT	Perjalanan Dinas dari Painan ke Padang pada tanggal 26 Oktober 2021 dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021	20 / III.f.3 /Sarpras/ X / 2021	630.000			

22	28 Oktober 2021	Yul Afrizal, SP	Perjalanan Dinas dari Painan ke Padang pada tanggal 15 -16 September 2021 dalam rangka Sosialisasi Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021	21 / III.f.3 /Sarpras/ X / 2021	380.000				
23	28 Oktober 2021	Herwindi Pradana	Perjalanan Dinas dari Painan ke Padang pada tanggal 15 -16 September 2021 dalam rangka Sosialisasi Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021	22 / III.f.3 /Sarpras/ X / 2021	380.000				
24	28 Oktober 2021	Liusman, S.STPi	Perjalanan Dinas dari Painan ke Kec. Silaut pada tanggal 27 Oktober 2021 dalam rangka Pengecekan Lapangan Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021	23 / III.f.1 /Sarpras/ X / 2021	300.000				
25	28 Oktober 2021	Okti Diana Bahrin, SP	Perjalanan Dinas dari Painan ke Kec. Silaut pada tanggal 27 Oktober 2021 dalam rangka Pengecekan Lapangan Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021	24 / III.f.1 /Sarpras/ X / 2021	300.000				
26	30 November 2021		Nihil		-			-	
27	15 Desember 2021	Wardi, STP	Perjalanan Dinas dari Painan ke Padang pada tanggal 2 Desember 2021 dalam rangka Menghadiri Undangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021	25 / III.g.1 /Sarpras/ XII / 2021	440.000				

28	15 Desember 2021	Noni Mardiani, SP	Perjalanan Dinas dari Painan ke Padang pada tanggal 2 Desember 2021 dalam rangka Menghadiri Undangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021	26 / III.g.1 /Sarpras/ XII / 2021	240.000				
29	15 Desember 2021	Rosi Yulita, SP	Honor bendahara Tim dan Staf Pengelola Keuangan Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa sawit Bulan September - November 2021	27 / III.d.1.2 /Sarpras/ XII / 2021	2.190.000	63.000			
30	15 Desember 2021	Shinta Komputer	Sewa Laptop selama 3 bulan (September - November 2021) Untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021	28 / III.e.1 /Sarpras/ XII / 2021	3.000.000		60.000		
31	15 Desember 2021	Shinta Komputer	Sewa Printer selama 3 bulan (September - November 2021) Untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021	29 / III.e.2 /Sarpras/ XII / 2021	900.000		18.000		
					29.784.500	126.000	156.000	100.000	

Bukti-bukti pengeluaran anggaran tersebut diatas (asli) disimpan oleh Sekretariat Tim Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

1	Jumlah Bulan ini	:	29.784.500	Painan 31 Desember 2021
2	Jumlah Bulan lalu	:	-	
	Jumlah SPJ s/d saat ini	:	29.784.500	



B. Pajak

REKAPITULASI SETORAN PAJAK
KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2021

No	Jenis Pajak	Jenis Setoran	Uraian	Tanggal Setor	Jumlah (Rp)
1	2	3		4	5
1	Pajak Restoran	Pajak Makan Minum	Penyetoran Pajak Makan Minum kegiatan Sosialisasi Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021	30 Agustus 2021	100.000
2	411124-PPh pasal 23	104-Jasa	Penyetoran PPh Pasal 23 sewa Laptop bulan Juni - Agustus 2021	8 September 2021	60.000
3	411124-PPh pasal 23	104-Jasa	Penyetoran PPh Pasal 23 sewa Printer bulan Juni - Agustus 2021	8 September 2021	18.000
4	411121-PPh pasal 21	100-Masa PPh Pasal 21	Penyetoran PPh Pasal 21 Honor Bendahara Tim A.n Rosi Yulita, SP bulan Juni - Agustus 2021	8 September 2021	63.000
5	411124-PPh pasal 23	104-Jasa	Penyetoran PPh Pasal 23 sewa Laptop bulan September - November 2021	14 Desember 2021	60.000

6	411124-PPh pasal 23	104-Jasa	Penyetoran PPh Pasal 23 sewa Printer bulan September - November 2021	14 Desember 2021	18.000
7	411121-PPh pasal 21	100-Masa PPh Pasal 21	Penyetoran PPh Pasal 21 Honor Bendahara Tim A.n Rosi Yulita, SP bulan September - November 2021	14 Desember 2021	63.000
Jumlah					382.000

Painan, 31 Desember 2021

Bendahara Tim

Ry

Rosi Yulita, SP

Nip. 19800810 201101 2010



BAB IV. REALISASI KEGIATAN LAPANGAN SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

4.1.Sosialisasi Tingkat Desa dan Kabupaten

Persiapan pelaksanaan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Pekebun yang dilakukan oleh Tim Khusus Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Sarana Prasarana Direktorat Jenderal Perkebunan, Provinsi dan Kabupaten diantaranya mengadakan sosialisasi peremajaan di tingkat kabupaten dan Desa, Pendampingan, konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait yang diikuti dengan kegiatan verifikasi dokumen persyaratan Sarana dan Prasarana Tanaman Kelapa Sawit Pekebun. Kegiatan pendampingan dilaksanakan melalui *detasering* kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani/koperasi dalam melengkapi persyaratan dokumen untuk penerbitan rekomendasi teknis Direktur Jenderal Perkebunan.

4.2. Pendampingan Di Lapangan

Pendampingan dilaksanakan melalui *detasering* yaitu dengan menempatkan tenaga Pendamping Desa, Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kabupaten ke lokasi untuk membantu kelompok tani/gapoktan/koperasi dalam mempersiapkan persyaratan/dokumen yang diperlukan untuk diusulkan dalam kegiatan sarana dan prasarana dalam kerangka pendanaan BPDPKS. Namun saat ini tenaga pendamping yang tersedia adalah tenaga pendamping dikecamatan. *Detasering* dilakukan pada 2 koperasi yaitu perkumpulan kelompok tani karya bersama dan koperasi langggeng jaya yang ada di Kecamatan Silaut. Pendampingan di lapangan juga dilakukan oleh petugas penilai kemajuan pekerjaan kegiatan peremajaan kelapa sawit 1 orang di Kecamatan Silaut.

BAB V. PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Permasalahan yang terjadi selama persiapan sampai dengan pengusulan kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit sangat beragam dan cukup mendasar sehingga mempengaruhi kinerja penyelesaian pengusulan.

5.1. Permasalahan Keuangan

1. Persiapan dokumen usulan membutuhkan biaya operasional seperti sosialisasi, transportasi, tenaga kerja, jasa pengambilan titik koordinat, jasa SID (Survey, investigasi, desain) untuk pengusul jalan kebun dan biaya tak terduga lainnya
2. Pengusul intensifikasi bantuan diberikan dalam bentuk barang, sehingga biaya pengawasan ditiadakan. Hal ini tentu akan memberatkan pengurus koperasi untuk mengganti biaya operasional yang dikeluarkan selama proses pengajuan kegiatan.
3. Masih terbatasnya sarana kerja Tim Khusus antara lain komputer (PC, laptop) dan *scanner*;

5.2 Permasalahan Teknis

1. Persyaratan usulan kegiatan di awal sosialisasi yang awalnya cukup sederhana, sekarang bertambah bahkan lebih banyak dibandingkan kegiatan peremajaan. Sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk persiapannya, dan hal ini mempengaruhi motivasi koperasi dalam mempersiapkan bahan
2. Kegiatan sarana dan prasarana tahun ini adalah tahun pertama dilaksanakan, sehingga belum ada kepastian terkait cara kerja, format baku, dan besaran dana yang diterima. Terutama dalam pembuatan RAB, pengusul dan instansi pendamping belum dibekali terkait item pekerjaan yang boleh dimasukkan RAB dan besaran anggaran maksimal yang boleh dimasukkan kedalam RAB.
3. Petugas di Dinas Pertanian belum punya dasar ilmu terkait dengan SID dan RAB untuk jalan kebun, sehingga ada keterbatasan dalam melakukan verifikasi SID dan RAB yang diajukan.
4. Kurangnya tenaga atau petugas pendamping pada Dinas Kabupaten/Kota Dan Propinsi yang menangani urusan dibidang Perkebunan.
5. Adanya ego sektoral antar Instansi yang menyebabkan lemah koordinasi lintas Instansi seperti dengan BPN, Dinas Kehutanan, Wali Nagari dan Kecamatan yang memperlambat proses pengurusan dokumen

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Bertolak dari permasalahan yang dijumpai pada saat pelaksanaan pengusulan dan penerbitan rekomendasi teknis perlu dilakukan rencana tindak lanjut sebagai upaya solusi pelaksanaan kegiatan kedepan

1. Perlu di sederhanakan bahan pengajuan sesuai dengan kebutuhan item kegiatan yang diajukan. Surat Keterangan tidak sangketa lahan untuk koperasi yang mengajukan intensifikasi (pupuk dan pestisida) dan jalan kebun, seharusnya tidak dibutuhkan karena bantuan ini meningkatkan nilai lahan dan tanaman, serta tidak mengganggu lahan dan tanaman yang sudah ada.
2. Perlu diadakan bimtek format baku, SID dan RAB untuk memudahkan dan mempercepat persiapan bahan yang diajukan. Pengajuan dengan format yang beragam, akan terjadi revisi berulang kali untuk menyesuaikan dengan aturan yang ada pada verifikator.
3. Perlu dilibatkan tenaga Penyuluh Pertanian sebagai tenaga pendamping, dan tenaga pendamping ini harus mengikuti bimtek kegiatan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit.
4. Sosialisasi ditingkat Kabupaten yang melibatkan semua stakeholder yang terlibat antarlain BPN, Dinas Kehutanan, Wali Nagari dan Kecamatan.

5.4 Upaya Percepatan

Dilakukan verifikasi lebih lanjut ke lapangan terkait bahan yang diajukan koperasi, sehingga hasil verifikasi dari Kabupaten ini sudah memastikan bahwa profil lahan dan pekebun sudah memenuhi syarat. Berkaca dari kegiatan peremajaan sawit, profil kebun yang dikirimkan setelah dilakukan cek melalui citra satelit ada lahan kosong, bangunan permanen, jalan. Khusus untuk kegiatan sarana dan prasarana perlu pekebun yang menerima manfaat sudah berproduksi dan memiliki umur diatas 4 tahun. Hal ini juga untuk menghindari bahan yang sudah sampai di Ditjenbun kembali turun ke pengusul untuk memperbaiki bahan usulan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

6.1 Laporan Monev Bulanan

Laporan monev bulanan yang dilakukan terkait dengan bahan/dokumen dari pengusul. Evaluasi yang dilakukan terkait kelengkapan dan akurasi dokumen yang dikirimkan.

6.2 laporan kemajuan fisik lapangan

Laporan kemajuan fisik belum dilakukan karena belum ada diantara koperasi yang rekomtek

BAB VII. PENUTUP

Minat dari pekebun untuk ikut bergabung bersama koperasi untuk bisa menerima manfaat dari kegiatan sarana dan prasarana perkebunan cukup tinggi, karena kegiatan ini tidak mengganggu lahan dan tanaman yang sudah ada bahkan mampu meningkatkan produksi, produktivitas serta mutu kelapa sawit milik pekebun. Dua koperasi yang ikut dalam kegiatan sarana dan prasarana ini ikut juga dalam kegiatan peremajaan sawit, sehingga fokus pengurus koperasi terbelah antara sarana dan prasarana dengan peremajaan. Masalah yang dialami di peremajaan sawit juga menurunkan motivasi dari pengurus koperasi untuk mempercepat dalam mempersiapkan bahan/dokumen pengajuan. Bahan dan dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan peremajaan dan sarana prasarana hampir sama, hal ini juga mendukung untuk percepatan karena koperasi sudah berpengalaman dalam mempersiapkan dokumen di kegiatan peremajaan.

Lampiran 1.

MoU Surat Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 5 April 2021.



Lampiran 2.

Sosialisasi Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan di Tingkat Propinsi Sumatera Barat



Lampiran 3.

Sosialisasi Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Tingkat Kabupaten di Kecamatan Sillaut



Lampiran 4.

Pertemuan Pemberkasan Sarana dan Prasarana Perkebunan di Tingkat Propinsi



Lampiran 5.

Cek Lahan Melalui Citra Satelit Berdasarkan Titik Koordinat

